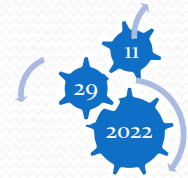




MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945

PEMAHAMAN
HKWN

DR.H. WIRYANTO, S.H.,M.H.



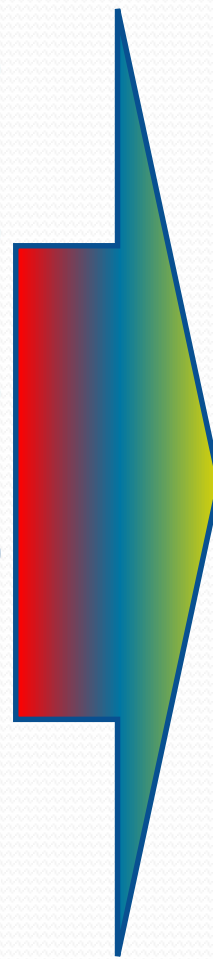
Materi di Sampaikan: Dalam Pemahaman Hak Konstitusional Warga
Negara bagi Aparatur dan Tokoh Desa Konstitusi
Cisarua, 29 November 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945



- Pertama **Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia**
- Kedua **Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**
- Ketiga **Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi**
- Keempat **Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi**
- Kelima **Karakteristik Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**
- Keenam **Hukum Acara Pengujian UU**



**TEGAKNYA
HUKUM
DAN
KEADILAN**

PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA

PRA-
KEMERDEKAAN

Sidang
BPUPKI

Yamin vs
Soepomo

Gagasan
"menguap"

ORDE LAMA

Perubahan
Konstitusi

Konstituante

Deadlock

ORDE BARU

Aspirasi
IKAHI

UU Kekuasaan
Kehakiman

Judicial review
terbatas di MA

REFORMASI

Judicial review
di MPR RI

Amandemen
UUD 1945

Lahir
Mahkamah
Konstitusi

PENJELSAANNYA

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut trias politica dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.”

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

PERUBAHAN UUD 1945

Tuntutan Reformasi

- Amanademen UUD 1945; Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan Hukum, HAM dan Pemb. KKN
- Otonomi Daerah, Kebebasan Pers, Mewujudkan Kehidupan Berdemokrasi

Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan Tertinggi di Tertumpu pada MPR
- Kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden
- Pasal-Pasal yang terlalu luwes
- Kewenangan Presiden mengatur hal-hal penting dg UU
- Rumusan UUD 195 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

DASAR YURIDIS DAN TUJUAN

Dasar Yudisnya:

1. Pasal 3, Pasal 37 UUD 1945;
2. TAP MPR No.IX/MPR/1999;
3. TAP MPR No. IX/MPR/2000; dan
4. TAP MPR No. XI/MPR/2001

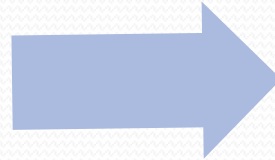
Tujuan

1. Tata Negara;
2. Kedaulatan Rakyat;
3. HAM;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Pemisahan Kekuasaan;
6. Eksistensi Negara Demokrasi Dan Negara Hukum;
7. Hal-hal Lain Sesuai Dg Perkembangan Bangsa dan Aspirasi bangsa

HASIL PERUBAHAN

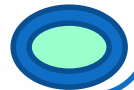
UUD 1945
(sebelum Amandemen)

- **Pembukaan;**
- **Batang Tubuh**
 - 16 Bab
 - 37 Pasal
 - 49 ayat
 - 4 psl aturan peralihan
 - 2 ayat aturan tambahan
- **Penjelasan**



UUD 1945
(setelah Amandemen)

- **Pembukaan**
- **Batang Tubuh**
 - 21 Bab
 - 73 pasal
 - 170 ayat
 - 3 pasal atauran peralihan
 - 2 pasal aturan tambahan

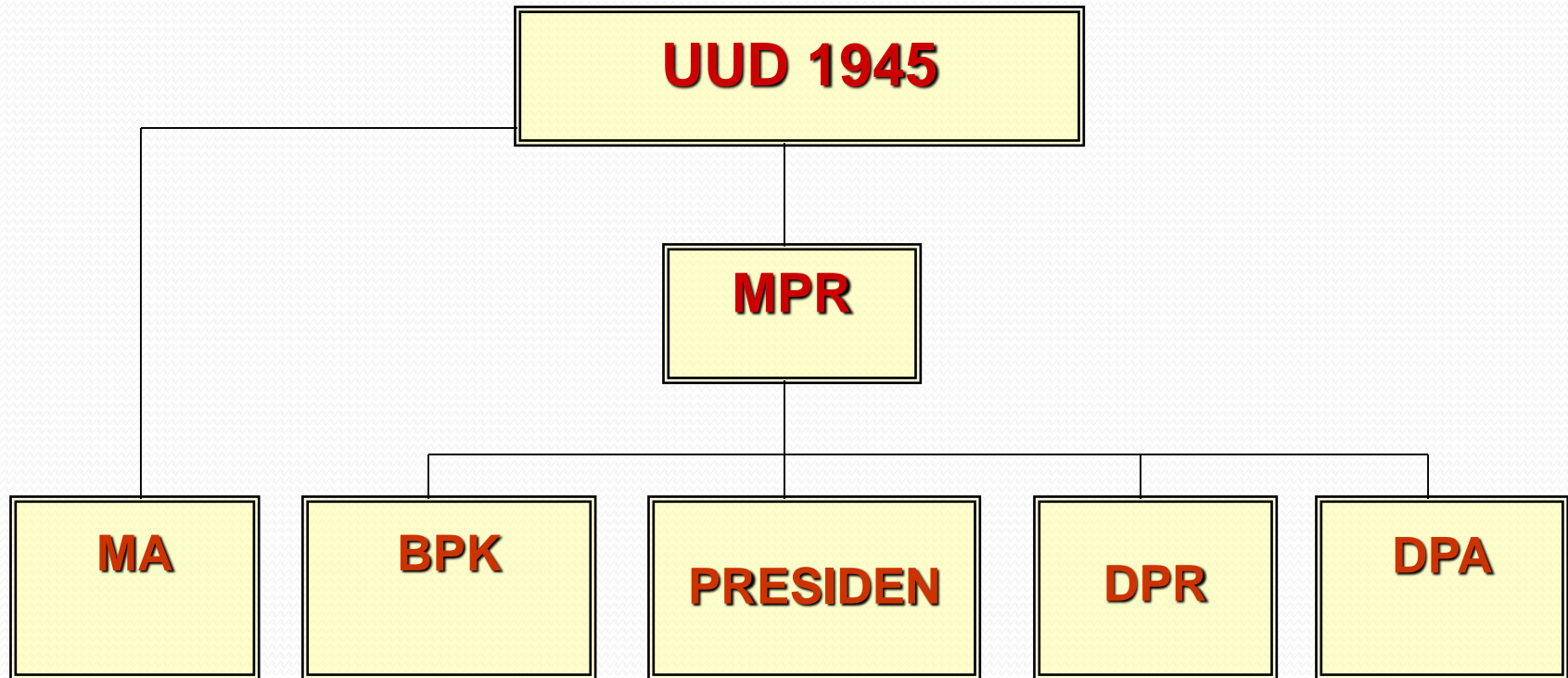


1. *SU MPR 1999*
Tgl. 14-21 Okt '99
2. *ST MPR 2000*
Tgl. 7-18 Agt. '00
3. *ST MPR 2001*
Tgl. 1-9 Nov. '01
4. *ST MPR 2002*
Tgl. 1-11 Agt. '02



GRAPH 1

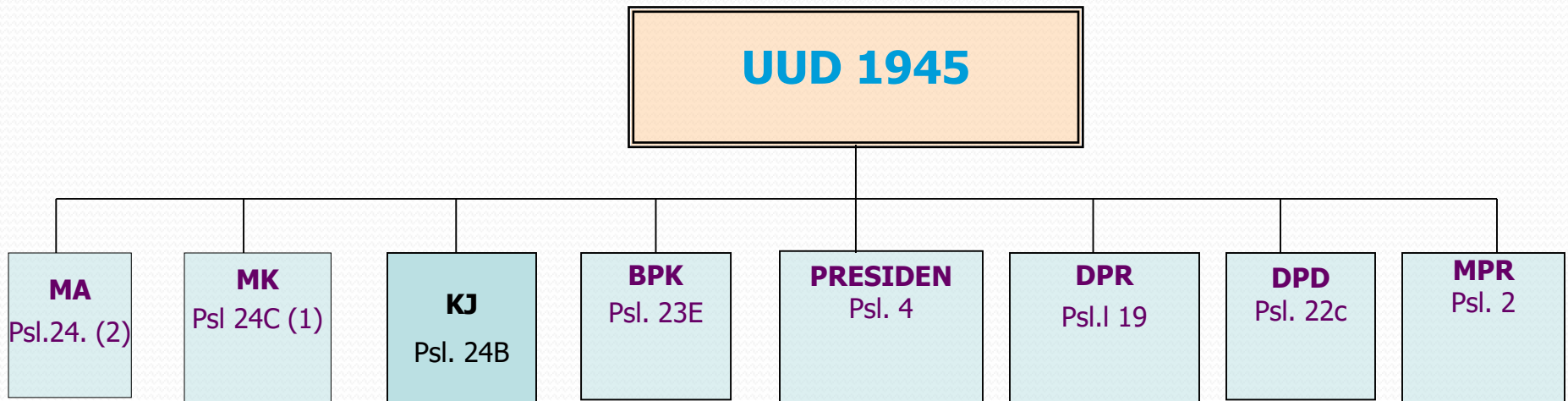
Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen – Vertikal Hirarkis



1. **MPR** : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)
2. **PRESIDEN**
3. **DPR** : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4. **DPA** : DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
5. **BPK** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6. **MA** : MAHKAMAH AGUNG

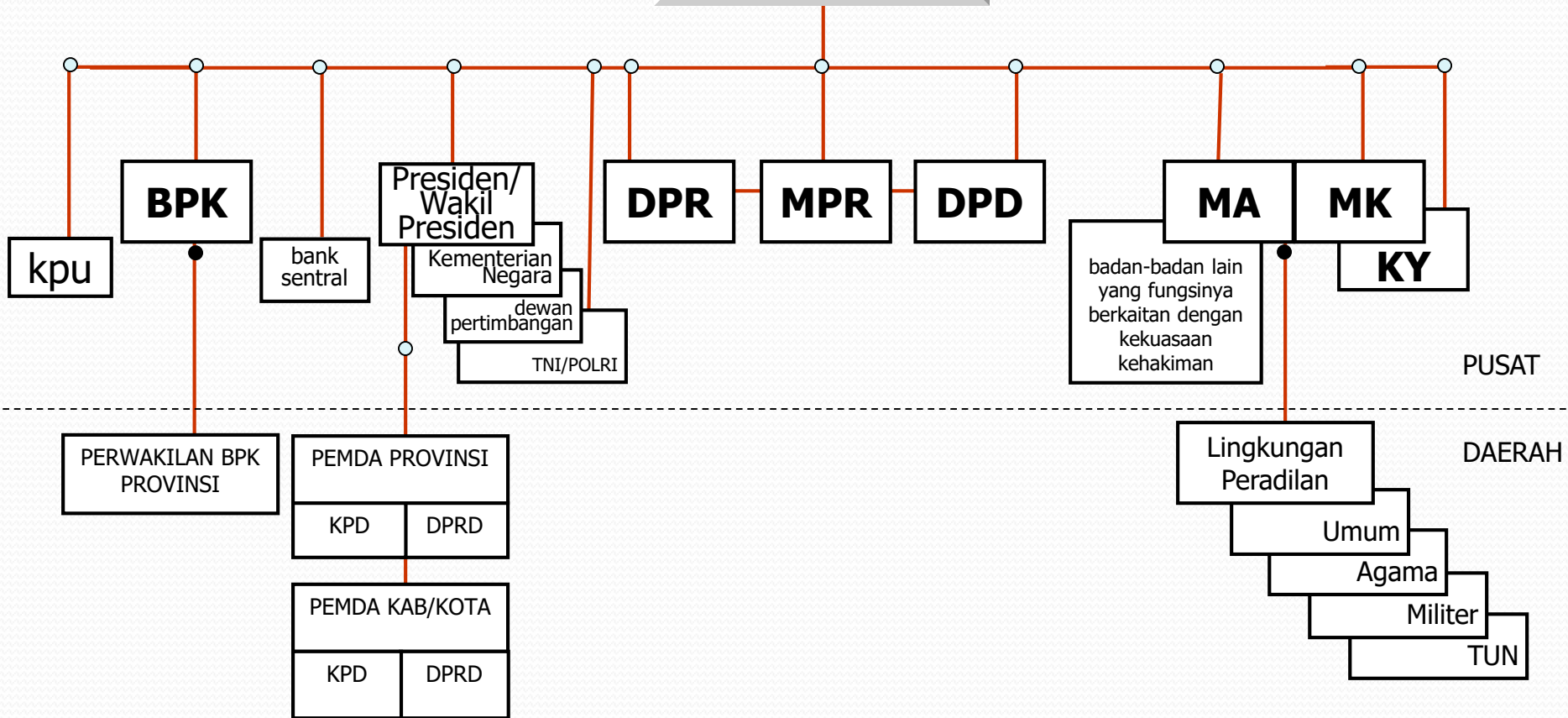
GRAPH 2

Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Setelah Amandemen – Horizontal Fungsional

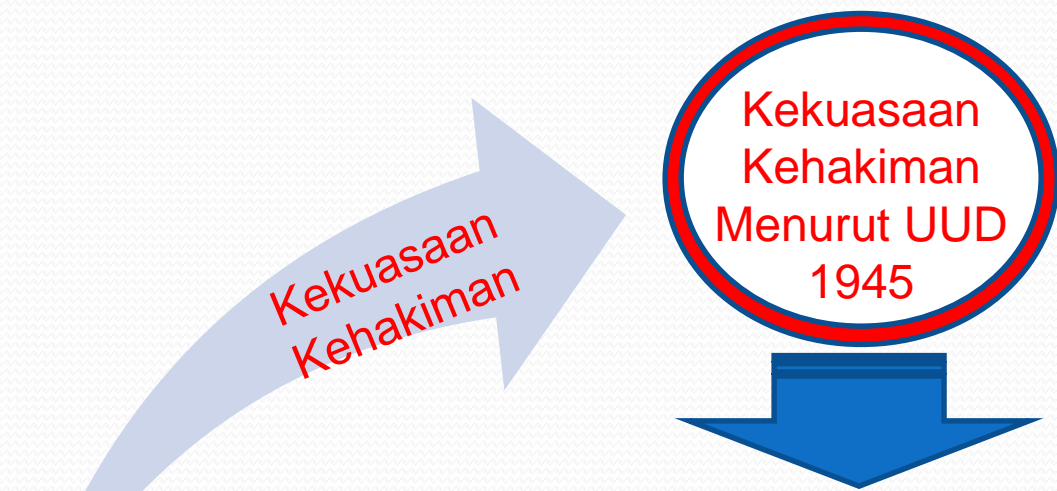


1. **MPR:** MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT -Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
2. **PRESIDEN**
3. **DPR :** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4. **DPD :** DEWAN PERWAKILAN DAERAH
5. **BPK :** BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6. **MA :** MAHKAMAH AGUNG
7. **MK :** MAHKAMAH KONSTITUSI
8. **KJ :** KOMISI JUDISIAL

UUD 1945



LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kekuasaan
Kehakiman

Kekuasaan
Kehakiman
Menurut UUD
1945

Pasal 24 UUD 1945:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. (***)

Pasal III Aturan Peralihan

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. (****)

• Pada tanggal 13 Agustus 2003, Presiden mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka tanggal 13 Agustus 2003 ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi



Kedudukan dan Susunan MK

Pasal 2 UU MK:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 4 UU MK:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perkembangan Wewenang

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan sengketa hasil perolehan suara Pilkada.

FUNGSI MK

The Guardian of the Constitution
(Penjaga Konstitusi)

The Final Interpreter of the
Constitution (Penafsir Konstitusi)

The Guardian of the Democracy
(Penjaga Demokrasi)

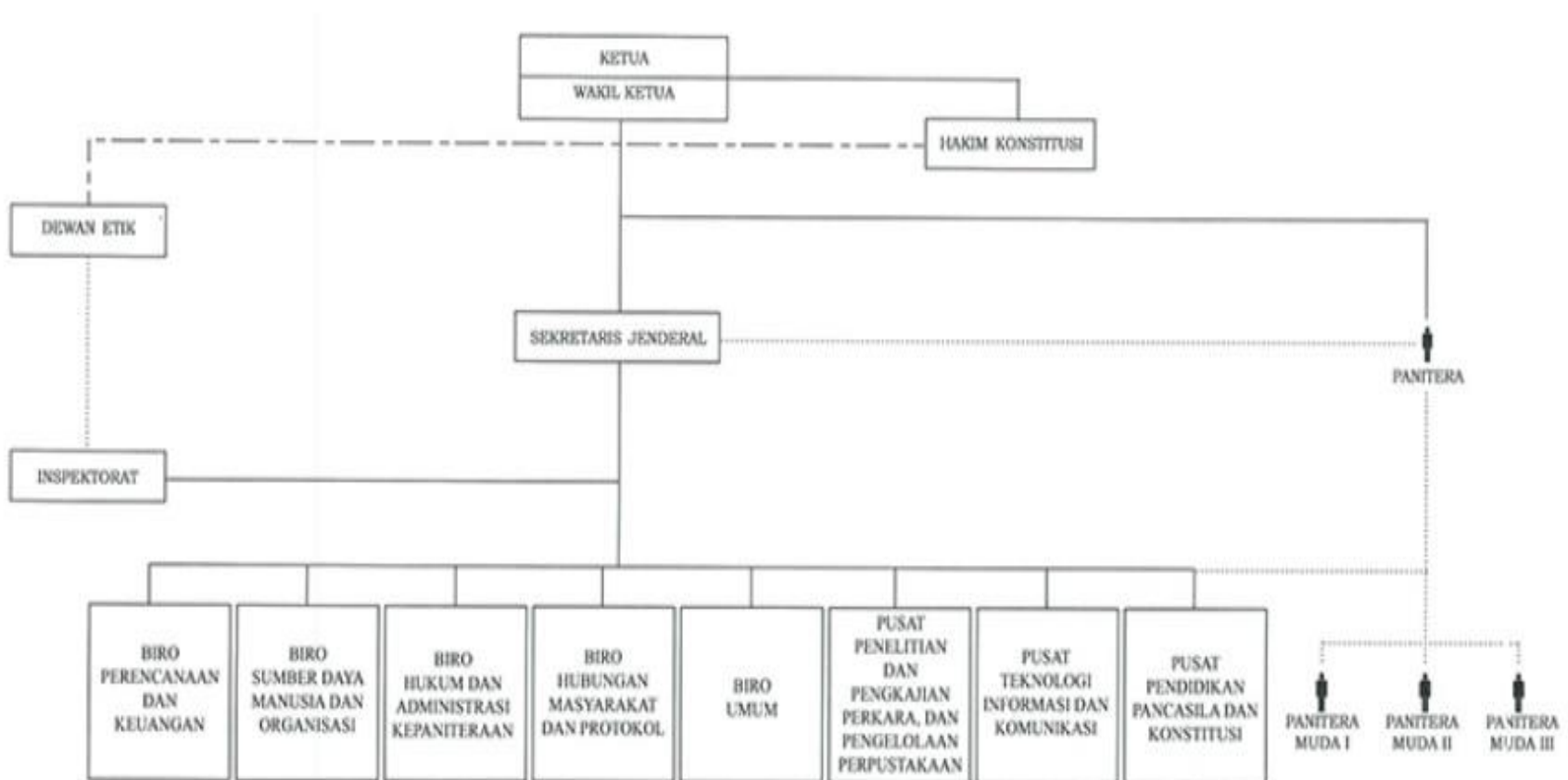
The Protector of the Citizen's
Constitutional Rights (Pelindung hak
konstitusional warga)

The Protector of the Human Rights
(Pelindung Hak asasi manusia)

STRUKTUR ORGANISASI MK



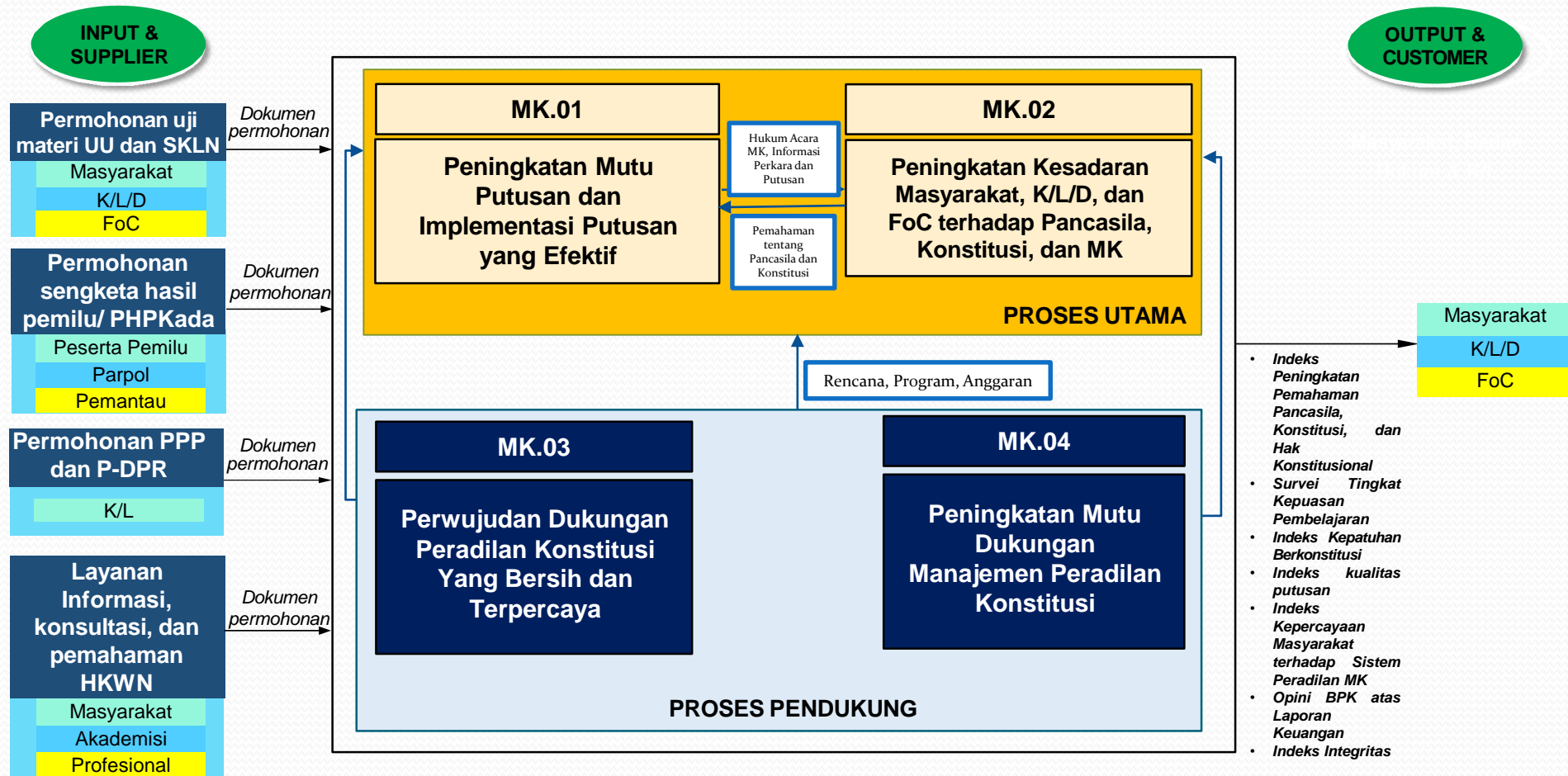
**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**



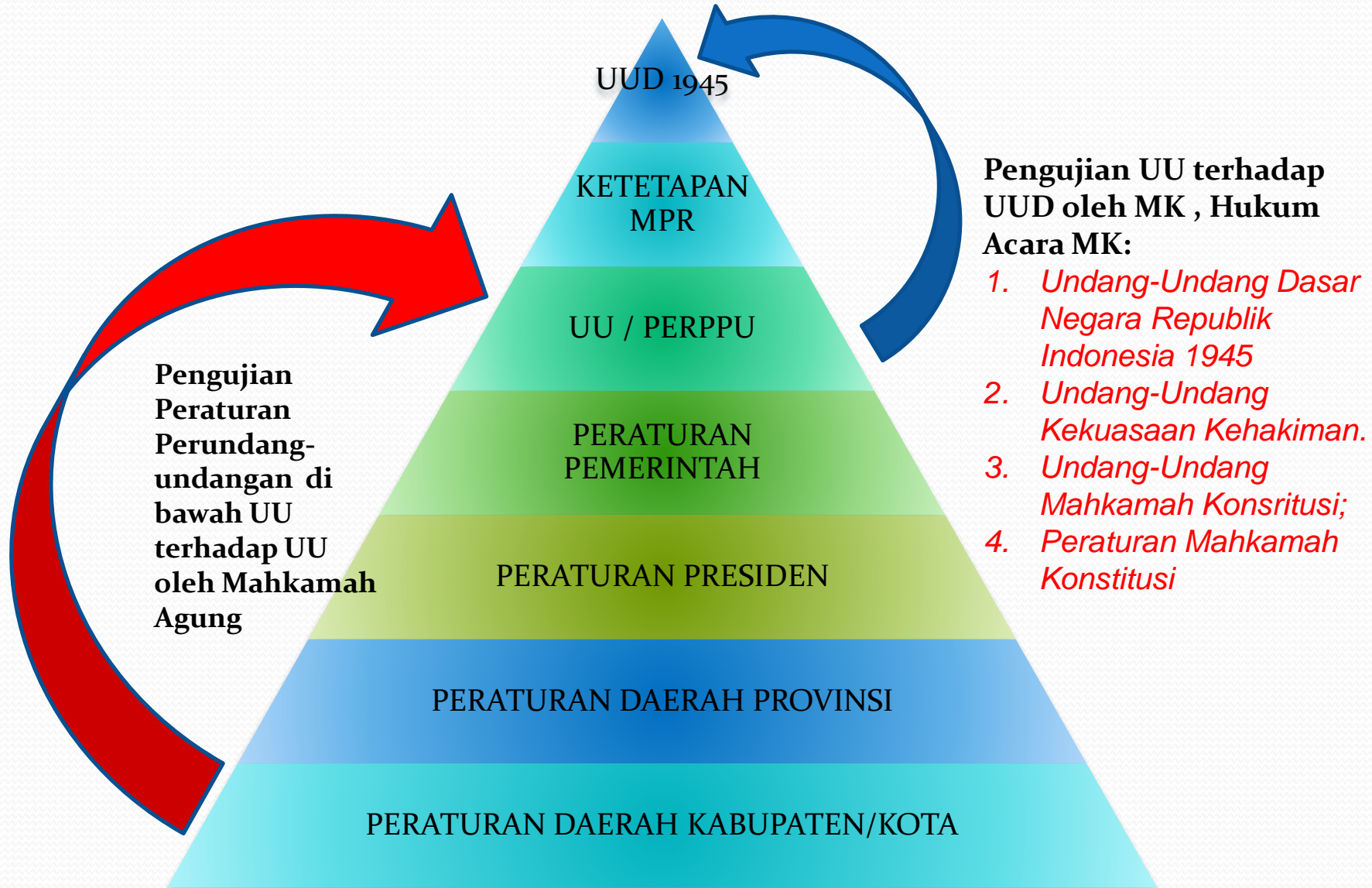
Dasar Hukum
Persekjen 13/2017

MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

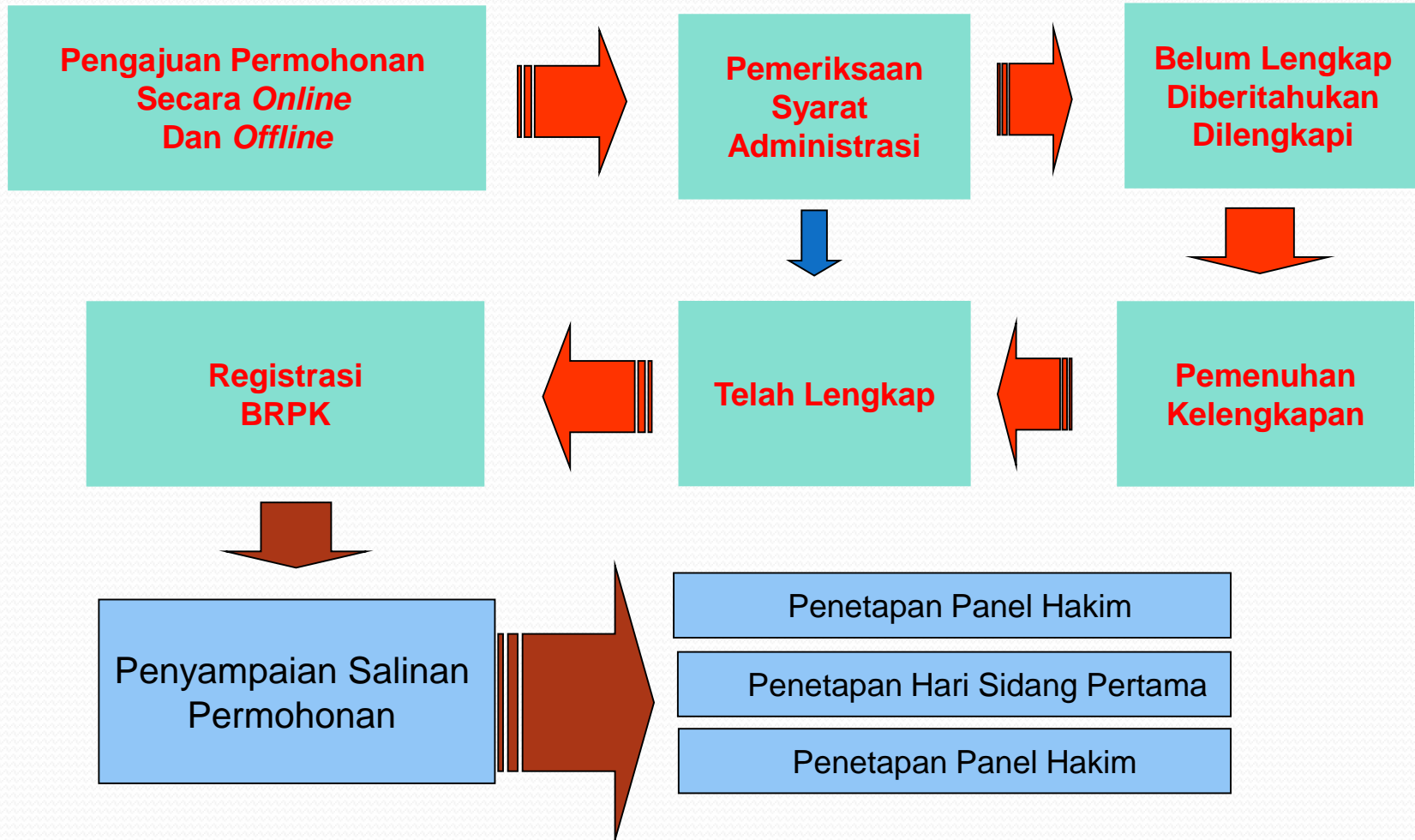
PROSES BISNIS UTAMA DAN PROSES PENDUKUNG

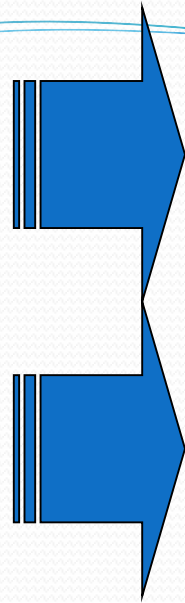
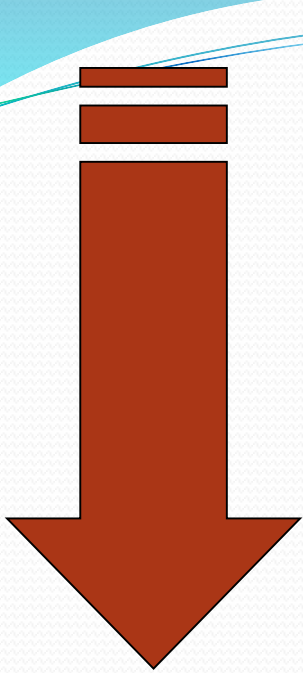


Supremasi Konstitusi di Indonesia



GAMBARAN UMUM PROSES BERACARA DI MK





PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT

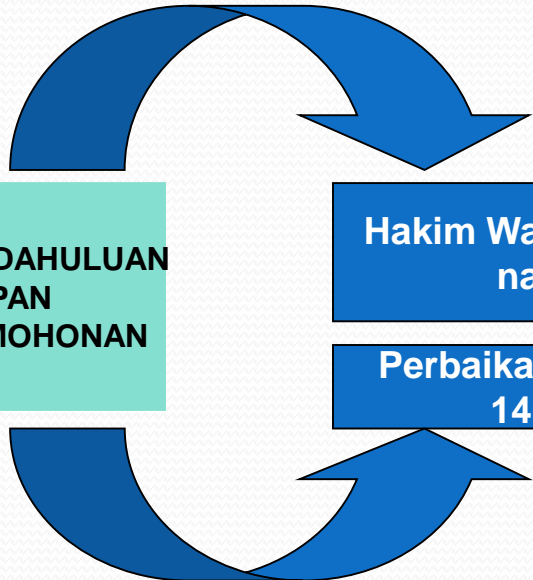
PERMOHONAN DAPAT DI TARIK KEMBALI SELAMA PROSES

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
•KELENGKAPAN
•KEJELASAN PERMOHONAN

Hakim Wajib memberi nasihat

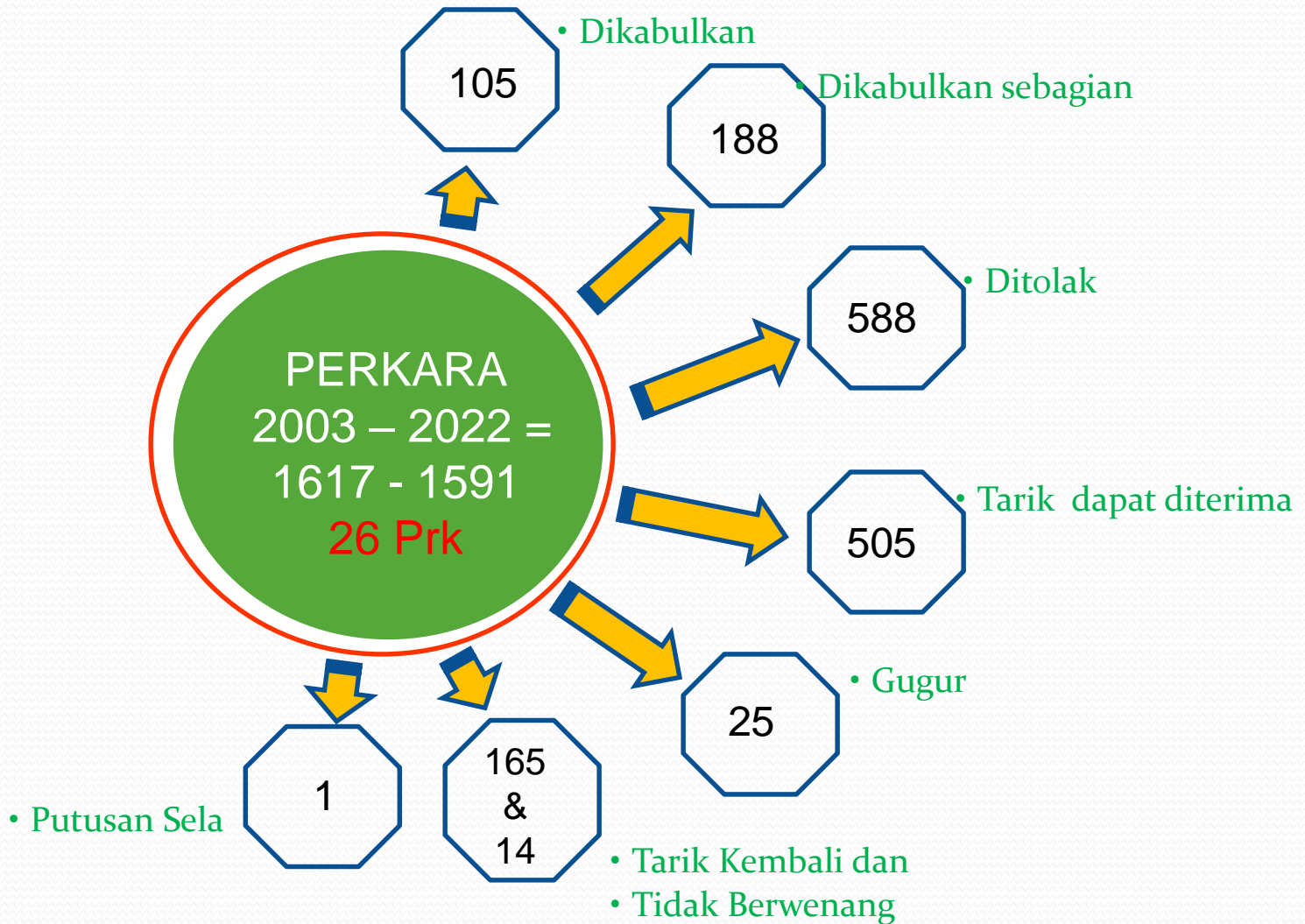
Perbaikan Pemohon 14 Hari

PEMOHON MELENGKAPI ATAU MEMPERBAIKI





UREKAPITULASI PERKARA PUU



TERIMA KASIH





Dr. H. WIRYANTO, S.H.,M.Hum.

S.H. (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang) Tahun 1995

M.Hum. (Universitas Diponegoro Semarang) Tahun 2002

Dr. (Universitas Brawijaya Malang) Tahun 2017



wiryanto44@gmail.com

wiryanto@mkri.id

- **Panitera Pengganti (Panitera Muda) di Pengadilan Semarang (1988 – 2003)**
- **Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi (2004 – 2006)**
- **Kepala Sub. Registrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2006 – 2011)**
- **Kepala Bagian Administrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2012 – 2014)**
- **Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa) di Mahkamah Konstitusi (2012-2013)**
- **Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi (2014 – 2016)**
- **Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Perpustakaan, (2017 – 2018)**
- **Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; (2019-2020);**
- **Panitera Muda II (2020 – sekarang).**